|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| H:\LOGO STKIP MUHAMMADIYAH TERBARU.jpg | STKIP Muhammadiyah  Aceh Barat Daya | Kode/No :  LPM-STKIPMABDYA/SPMI/STD.31 |
| Tanggal : 11 Oktober 2019 |
| Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri | Revisi : 0 |
| Halaman : 1 dari 7 |

**STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI**

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggung Jawab** | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tandatangan** |  |
| 1. Perumusan | Nisya Fajri, S.Pd.I, M.Pd | Ketua LPM |  |  |
| 1. Pemeriksa | Afdhal Jihad, M.Pd | Wakil Ketua |  |  |
| 1. Persetujuan | Ridwan Adami, MM | Ketua Senat |  |  |
| 1. Penetapan | Mismaruddin Mahdi | Ketua BPH |  |  |
| 1. Pengendalian | Nisya Fajri, S.Pd.I, M.Pd | Ketua LPM |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya** | **Visi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya**  “Unggul, professional, aplikatif dan Islami”  **Misi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya**   1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, berbasis Islam untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang unggul, kompetitif dan professional. 2. Pengembangan dan penyelenggaraan penelitian pendidikan, dengan memanfaatkan aplikasi teknologi. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud aplikasi ilmu yang dimiliki. |
| 1. **Rasionale Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri. |
| 1. **Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | 1. Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya 2. Wakil Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya 3. Kepala bagian akademik 4. Kepala bagian administrasi umum dan keuangan 5. Ketua Program Studi 6. Ketua LPM 7. Ketua LPPM |
| 1. **Defenisi Istilah** | * + 1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi     2. Kerja Sama adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi pemerintah dan/atau badan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis.     3. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.     4. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Menteri atau unit pemrakarsa di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas nama pemerintah Republik Indonesia dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.     5. Kerja Sama Payung adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hokum.     6. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.     7. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri.     8. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.     9. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.     10. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.     11. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.     12. Unit kerjasama di lingkungan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya meliputi Wakil, LPPM, dan LPM. |
| 1. **Pernyataan Isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | 1. Wakil Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam dan/atau luar negeri di bidang akademik dan non-akademik untuk dilaksanakan di tingkat sekolah tinggi dan prodi pada setiap awal tahun anggaran. 2. Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam dan/atau luar negeri di bidang akademik dan non-akademik baik di tingkat sekolah tinggi dan prodi pada setiap awal tahun anggaran. 3. Wakil Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang akademik dan non-akademik dengan institusi dalam dan/atau luar negeri minimal 1 kegiatan per tahun. 4. Wakil Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya harus menjalin dan mengimplementasi kerjasama di bidang akademik dan non-akademik dengan institusi dalam dan/atau luar negeri minimal 1 kerjasama per tahun. 5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional minimal 1 kerjasama per tahun. 6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 1 kerjasama per tahun. 7. Wakil Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun. 8. Wakil Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya harus menjalin kerjasama dalam dan/atau luar negeri di bidang akademik dan non-akademik minimal 1 kerjasama per tahun. 9. Ketua program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang akademik dan non akademik minimal 1 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat prodi per tahun. 10. Wakil Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam dan/atau luar negeri di bidang akademik dan non akademik berkoordinasi dengan senat sekolah tinggi dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran. 11. Kepala bidang akademik harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam dan/atau luar negeri di bidang akademik dan non akademik sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran. 12. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran. 13. Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun. |
| 1. **Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | * + 1. Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan/atau luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*)     2. Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya, program studi, dan unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.     3. Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk merealisasikan kerjasama. |
| 1. **Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | 1. Tersedianya pedoman tertulis dan POB tentang penjajakan, perundingan, dan perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam atau luar negeri di bidang akademik dan/atau non akademik untuk dilaksanakan di tingkat sekolah tinggi dan prodi. 2. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam atau luar negeri di bidang akademik dan/atau non akademik di tingkat sekolah tinggi dan prodi. 3. Terlaksananya kegiatan rintisan dan kerjasama di bidang akademik dan/atau non akademik dengan institusi dalam dan luar negeri. 4. Terjalinnya kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri. 5. Terlaksananya kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam atau luar negeri. 6. Terlaksananya kegiatan monev pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang akademik dan non akademik dengan senat sekolah tinggi dan mitra kerjasama. 7. Tersedianya laporan hasil monev dengan institusi dalam dan luar negeri di bidang akademik dan non akademik. 8. Terlaksananya audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya. 9. Tersedianya dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan monev dan audit kegiatan kerjasama. |
| 1. **Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | 1. Renstra STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya 2. Statuta STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya 3. Buku pedoman kerjasama kelembagaan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya 4. POB/SOP kerjasama STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya 5. Dokumen MOU kerjasama dalam dan/atau luar negeri. |
| 1. **Referensi** | 1. Permenristekdikti No 4 tahun 2017 tentang pedoman kerjasama di lingkungan Kemenristekdikti 2. UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| H:\LOGO STKIP MUHAMMADIYAH TERBARU.jpg | STKIP Muhammadiyah  Aceh Barat Daya | Kode/No :  LPM-STKIPMABDYA/SPMI/MAN.31.01 |
| Tanggal : 11 Oktober 2019 |
| Manual Penetapan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri | Revisi : 0 |
| Halaman : 1 dari 4 |

**MANUAL PENETAPAN**

**STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI**

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggung Jawab** | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tandatangan** |  |
| 1. Perumusan | Nisya Fajri, S.Pd.I, M.Pd | Ketua LPM |  |  |
| 1. Pemeriksa | Afdhal Jihad, M.Pd | Wakil Ketua |  |  |
| 1. Persetujuan | Ridwan Adami, MM | Ketua Senat |  |  |
| 1. Penetapan | Mismaruddin Mahdi | Ketua BPH |  |  |
| 1. Pengendalian | Nisya Fajri, S.Pd.I, M.Pd | Ketua LPM |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya** | **Visi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya**  “Unggul, professional, aplikatif dan Islami”  **Misi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya**   1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, berbasis Islam untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang unggul, kompetitif dan professional. 2. Pengembangan dan penyelenggaraan penelitian pendidikan, dengan memanfaatkan aplikasi teknologi. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud aplikasi ilmu yang dimiliki. |
| 1. **Tujuan Manual Penetapan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | Penetapan standar Kerjasama dalam dan luar negeri dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar Kerjasama dalam dan luar negeri di STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya, Program Studi, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam upaya peningkatan mutu Kerjasama dalam dan luar negeri secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga terciptanya budaya mutu di STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya. |
| 1. **Luas Lingkup Manual Penetapan Standar kerjasama dalam dan luar negeri dan Penggunaannya** | Manual ini berlaku :   1. Ketika sebuah standar Kerjasama dalam dan luar negeri pertama kali dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan; 2. Dalam pengelolaan pelaksana standar kerjasama dalam dan luar negeri di STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya |
| 1. **Defenisi Istilah** | 1. Merancang standar Kerjasama dalam dan luar negeri: olah pikir untuk menghasilkan standar Kerjasama dalam dan luar negeri tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya. 2. Merumuskan standar Kerjasama dalam dan luar negeri: menuliskan isi setiap standar Kerjasama dalam dan luar negeri ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs.* 3. Menetapkan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri sehingga Standar Kerjasama dalam dan luar negeri dinyatakan berlaku; 4. Studi pelacakan: studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draft standar 5. Uji publik: proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar. |
| 1. **Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | 1. Menjadikan Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar Kerjasama dalam dan luar negeri 3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi 4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis* 5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan internal dan/atau eksternal di STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya. 6. Lakukan analisis hasil dari langkah no 2. Hingga no 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya. 7. Merumuskan draf awal Standar Kerjasama dalam dan luar negeri yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence,* dan *Degree*) yang berarti:   *Audience* : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ ditugasi dalam pencapaian standar tersebut.  *Behaviour* : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “*should be*” yang harus selalu dapat diukur.  *Competence* : menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/ objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan.  *Degree* : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.   1. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan draf Standar pelaksana kerjasama dalam dan luar negeri dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya untuk mendapatkan saran dan masukan. 2. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali pernyataan Standar Kerjasama dalam dan luar negeridengan memerhatikan hasil dari no.8. 3. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 4. Mensahkan dan memberlakukan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri melalui penetapan dalam bentuk keputusan Ketua STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya |
| 1. **Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | Tim SPMI Perguruan Tinggi sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya dan semua unit kerja, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. |
| 1. **Catatan** | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :   * + Daftar peraturan perundang-undangan terkait pelaksana KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI   + Ketersediaan peraturan dalam No. 1   + Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey   + Formulir / *Tamplate* standar |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| H:\LOGO STKIP MUHAMMADIYAH TERBARU.jpg | STKIP Muhammadiyah  Aceh Barat Daya | Kode/No :  LPM-STKIPMABDYA/SPMI/MAN.31.02 |
| Tanggal : 11 Oktober 2019 |
| Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri | Revisi : 0 |
| Halaman : 1 dari 4 |

**MANUAL PELAKSANAAN**

**STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI**

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggung Jawab** | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tandatangan** |  |
| 1. Perumusan | Nisya Fajri, S.Pd.I, M.Pd | Ketua LPM |  |  |
| 1. Pemeriksa | Afdhal Jihad, M.Pd | Wakil Ketua |  |  |
| 1. Persetujuan | Ridwan Adami, MM | Ketua Senat |  |  |
| 1. Penetapan | Mismaruddin Mahdi | Ketua BPH |  |  |
| 1. Pengendalian | Nisya Fajri, S.Pd.I, M.Pd | Ketua LPM |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya** | **Visi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya**  “Unggul, professional, aplikatif dan Islami”  **Misi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya**   1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, berbasis Islam untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang unggul, kompetitif dan professional. 2. Pengembangan dan penyelenggaraan penelitian pendidikan, dengan memanfaatkan aplikasi teknologi. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud aplikasi ilmu yang dimiliki. |
| 1. **Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | Pelaksanaan standar Kerjasama dalam dan luar negeri dimaksudkan sebagai pemenuhan implementasi standar Kerjasama dalam dan luar negeri yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Sekolah Tinggi, Program Studi, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam upaya peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu Kerjasama dalam dan luar negeri secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga terciptanya budaya mutu di STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya. |
| 1. **Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri dan Penggunaannya** | Manual ini berlaku :   1. Ketika sebuah standar Kerjasama dalam dan luar negeri harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras; 2. Untuk semua standar Kerjasama dalam dan luar negeri |
| 1. **Defenisi Istilah** | 1. Melaksanakan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 2. Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. 3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas |
| 1. **Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | 1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif pelaksanaan Kerjasama dalam dan luar negeri yang disesuaikan dengan isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri 2. Menyiapkan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja / Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Kerjasama dalam dan luar negeri untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan 3. Melakukan sosialisasi isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 4. Pastikan ketercapaian indikator pelaksana standar kerjasama dalam dan luar negeri dengan menggunakan standar Kerjasama dalam dan luar negeri sebagai tolak ukur pencapaian.   Secara garis besar, tahap pelaksanaan atau pemenuhan standar Kerjasama dalam dan luar negeri dapat digambarkan dalam bagan berikut : |
| 1. **Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | Pihak yang harus melaksanakan Standar kerjasama dalam dan luar negeri adalah :   1. Unit khusus pengelola standar kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur standar Kerjasama dalam dan luar negeri yang bersangkutan 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kerjasama dalam dan luar negeri yang bersangkutan |
| 1. **Catatan** | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar Kerjasama dalam dan luar negeri |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| H:\LOGO STKIP MUHAMMADIYAH TERBARU.jpg | STKIP Muhammadiyah  Aceh Barat Daya | Kode/No :  LPM-STKIPMABDYA/SPMI/MAN.31.03 |
| Tanggal : 11 Oktober 2019 |
| Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri | Revisi : 0 |
| Halaman : 1 dari 4 |

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN**

**STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI**

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggung Jawab** | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tandatangan** |  |
| 1. Perumusan | Nisya Fajri, S.Pd.I, M.Pd | Ketua LPM |  |  |
| 1. Pemeriksa | Afdhal Jihad, M.Pd | Wakil Ketua |  |  |
| 1. Persetujuan | Ridwan Adami, MM | Ketua Senat |  |  |
| 1. Penetapan | Mismaruddin Mahdi | Ketua BPH |  |  |
| 1. Pengendalian | Nisya Fajri, S.Pd.I, M.Pd | Ketua LPM |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya** | **Visi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya**  “Unggul, professional, aplikatif dan Islami”  **Misi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya**   1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, berbasis Islam untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang unggul, kompetitif dan professional. 2. Pengembangan dan penyelenggaraan penelitian pendidikan, dengan memanfaatkan aplikasi teknologi. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud aplikasi ilmu yang dimiliki. |
| 1. **Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar kerjasama dalam dan luar negeri sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan. |
| 1. **Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri dan Penggunaannya** | Manual ini berlaku :   1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Kerjasama dalam dan luar negeri : diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksanaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Kerjasama dalam dan luar negeri telah dapat dicapai dan dipenuhi 2. Untuk semua isi standar Kerjasama dalam dan luar negeri |
| 1. **Defenisi Istilah** | 1. Evaluasi : melaksanakan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri 2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri |
| 1. **Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | 1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap ketercapaian isi semua standar Kerjasama dalam dan luar negeri 2. Melakukan catatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan standar kerjasama dalam dan luar negeri yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan. 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas 6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kerjasama dalam dan luar negeri kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STKIP Muhammmadiyah Aceh Barat Daya, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.   Secara garis besar, tahap pelaksanaan atau pemenuhan standar KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI dapat digambarkan dalam bagan berikut : |
| 1. **Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar kerjasama dalam dan luar negeri** | Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar kerjasama dalam dan luar negeri adalah :   1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan Tim Monitoring dan Evaluasi. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar kerjasama dalam dan luar negeri yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar kerjasama dalam dan luar negeri yang bersangkutan. |
| 1. **Catatan** | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :   1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri 3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| H:\LOGO STKIP MUHAMMADIYAH TERBARU.jpg | STKIP Muhammadiyah  Aceh Barat Daya | Kode/No :  LPM-STKIPMABDYA/SPMI/MAN.31.04 |
| Tanggal : 11 Oktober 2019 |
| Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri | Revisi : 0 |
| Halaman : 1 dari 4 |

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN**

**STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI**

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggung Jawab** | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tandatangan** |  |
| 1. Perumusan | Nisya Fajri, S.Pd.I, M.Pd | Ketua LPM |  |  |
| 1. Pemeriksa | Afdhal Jihad, M.Pd | Wakil Ketua |  |  |
| 1. Persetujuan | Ridwan Adami, MM | Ketua Senat |  |  |
| 1. Penetapan | Mismaruddin Mahdi | Ketua BPH |  |  |
| 1. Pengendalian | Nisya Fajri, S.Pd.I, M.Pd | Ketua LPM |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya** | **Visi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya**  “Unggul, professional, aplikatif dan Islami”  **Misi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya**   1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, berbasis Islam untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang unggul, kompetitif dan professional. 2. Pengembangan dan penyelenggaraan penelitian pendidikan, dengan memanfaatkan aplikasi teknologi. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud aplikasi ilmu yang dimiliki. |
| 1. **Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri sehingga isi Standar dapat tercapai/terpenuhi. |
| 1. **Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri dan Penggunaannya** | Manual ini berlaku :   1. Ketika pelaksanaan isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Kerjasama dalam dan luar negeri terpenuhi; 2. Untuk semua isi standar Kerjasama dalam dan luar negeri |
| 1. **Defenisi Istilah** | 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri dapat diperbaiki. 2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar. |
| 1. **Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri, atau apabila isi Standar gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal : apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar Kerjasama dalam dan luar negeri seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya, disertai saran dan rekomendasi. |
| 1. **Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri adalah :   1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan / atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Kerjasama dalam dan luar negeri yang bersangkutan, dan / atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri yang bersangkutan. |
| 1. **Catatan** | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :   1. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri 3. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksaan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri 4. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar Kerjasama dalam dan luar negeri 5. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang di ambil 6. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut 7. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas 8. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya, disertai saran atau rekomendasi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| H:\LOGO STKIP MUHAMMADIYAH TERBARU.jpg | STKIP Muhammadiyah  Aceh Barat Daya | Kode/No :  LPM-STKIPMABDYA/SPMI/MAN.31.05 |
| Tanggal : 11 Oktober 2019 |
| Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri | Revisi : 0 |
| Halaman : 1 dari 5 |

**MANUAL PENINGKATAN PELAKSANAAN**

**STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI**

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggung Jawab** | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tandatangan** |  |
| 1. Perumusan | Nisya Fajri, S.Pd.I, M.Pd | Ketua LPM |  |  |
| 1. Pemeriksa | Afdhal Jihad, M.Pd | Wakil Ketua |  |  |
| 1. Persetujuan | Ridwan Adami, MM | Ketua Senat |  |  |
| 1. Penetapan | Mismaruddin Mahdi | Ketua BPH |  |  |
| 1. Pengendalian | Nisya Fajri, S.Pd.I, M.Pd | Ketua LPM |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya** | **Visi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya**  “Unggul, professional, aplikatif dan Islami”  **Misi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya**   1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, berbasis Islam untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang unggul, kompetitif dan professional. 2. Pengembangan dan penyelenggaraan penelitian pendidikan, dengan memanfaatkan aplikasi teknologi. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud aplikasi ilmu yang dimiliki. |
| 1. **Tujuan Manual Peningkatan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri setiap akhir siklus atau Standar Kerjasama dalam dan luar negeri |
| 1. **Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri dan Penggunaannya** | Manual ini berlaku :   1. Ketika pelaksanaan isi setiap Standar Kerjasama dalam dan luar negeri dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Kerjasama dalam dan luar negeri tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Untuk semua standar Kerjasama dalam dan luar negeri. |
| 1. **Defenisi Istilah** | 1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri : tindakan menilai isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri didasarkan, antara lain, pada :    * 1. Hasil pelaksanaan isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri pada waktu sebelumnya;      2. Perkembangan situasi dan kondisi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya dan masyarakat pada umumnya, dan      3. Relevansinya dengan Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya 3. Siklus Standar Kerjasama dalam dan luar negeri : durasi atau masa berlakunya suatu Standar Kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan aspek yang di atur di dalamnya |
| 1. **Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | * + - 1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Kerjasama dalam dan luar negeri       2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen       3. Evaluasi isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri       4. Lakukan revisi isi Standar Kerjasama dalam dan luar negeri sehingga menjadi standar Kerjasama dalam dan luar negeri baru yang lebih tinggi daripada Standar Kerjasama dalam dan luar negeri sebelumnya       5. Tempuh standar atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Kerjasama dalam dan luar negeri yang baru. |
| 1. **Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melakukan Peningkatan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri** | Pihak yang harus meningkatkan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri adalah :  Unit kerja khusus SPMI dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen. |
| 1. **Catatan** | Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/tamplate standar.  Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar Kerjasama dalam dan luar negeri |